

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

a. Latar Belakang

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BPPP Bitung didirikan pada tahun 1974 dengan nama Training Center (TC) Perikanan. Kemudian pada tahun 1975, TC Perikanan diubah namanya menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Aertembaga. Pada tahun 1978 namanya diubah kembali menjadi Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Aertembaga, dan sejak tahun 2001 nama BKPI Bitung diubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Aertembaga serta pada Tahun 30 Maret 2017 melalui Permen KP No. 27/PERMEN-KP/ 2017 NOMENKLATUR Balai resmi berubah menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung.

Entitas berkedudukan di Jalan Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Selama kurun waktu 42 tahun BPPP Bitung telah 11 (sebelas) kali berganti pemimpin.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi, maka BPPP Bitung menyusun visi yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu “Terwujudnya Sumberdaya Manusia Perikanan yang Terampil dan Mampu Mengelola Usaha Perikanan”. Adapun rumusan Misi BPPP Bitung sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelaksanaan diklat yang profesional dan berkualitas.
2. Mengembangkan aparatur Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung menuju profesionalisme sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Mengembangkan pelatihan sesuai dengan pangsa pasar.
4. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kemajuan teknologi.
6. Menata lingkungan kampus yang bersih, indah dan amanologi.

Sebagai salah satu UPT dari BPPSDM Kelautan dan Perikanan, BPPP Bitung memiliki tugas untuk “Melaksanakan Penyusunan Bahan Kebijakan, Program dan Anggaran, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya BPPP Bitung memegang fungsi sebagai Perencanaan kegiatan pelatihan teknis dan manajerial dibidang kelautan dan perikanan, penyusunan materi metodologi dan penyelenggaraan penyuluh perikanan sesuai kondisi wilayah, pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang kelautan dan perikanan, pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Wilayah pengembangan BPPP Bitung meliputi 7 (tujuh) Provinsi dengan 79 Kabupaten / Kota, yaitu :

1. Provinsi Sulawesi Utara : 4 Kota dan 11 Kabupaten
2. Provinsi Gorontalo: 1 Kota dan 5 Kabupaten
3. Provinsi Sulawesi Tengah: 1 Kota dan 12 Kabupaten
4. Provinsi Sulawesi Selatan : 3 Kota dan 21 Kabupaten
5. Provinsi Kalimantan Timur : 3 Kota dan 7 Kabupaten

6. Provinsi Kalimantan Utara : 1 Kota dan 4 Kabupaten

7. Provinsi Sulawesi Barat : 6 Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPPP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas masing-masing, sebagai berikut :

a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Bitung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Jumlah keseluruhan pegawai BPPP Bitung sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 423 orang, terdiri dari PNS 277 orang, 31 orang PPPK, 103 orang Penyuluh Perikanan Bantu, dan tenaga kontrak 12 orang. PNS BPPP Bitung berdasarkan golongan disajikan berikut ini :

PNS BPPP Bitung berdasarkan Golongan

No.	Uraia	Jumla
1	Golongan II	72
2	Golongan III	17
3	Golongan IV	31
	Jumlah	27

PNS BPPP Bitung berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan berikut ini :

**Tabel 2. PNS BPPP Bitung
berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat	Jumlah
1	SLTA	36
2	D3	63
3	S1	14
4	D4	19
5	S2	13
	Jumlah	27

BPPP Bitung memiliki 5 (lima) jabatan fungsional yang siap memberikan bimbingan dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan.

Kelima jabatan fungsional tersebut yaitu :

- Jabatan Fungsional Instruktur
- Jabatan Fungsional Widyaiswara
- Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
- Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan
- Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
- Jabatan Fungsional Perencana

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI full module untuk seluruh K/L pada Tahun 2023, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh

satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP).

Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016. Dengan penerapan SAKTI full module maka proses bisnis rekonsiliasi mulai Tahun 2022 perlu disesuaikan, yaitu Aplikasi e-Rekon&LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat website <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Periklanan Bitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan- LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000

(dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(2) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(3) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(4) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan per 31 Desember 2023, Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	187.865.000	187.865.000
		-
Jumlah Pendapatan	187.865.000	187.865.000
Belanja	-	-
Belanja Pegawai	43.378.397.000	42.776.871.000
Belanja Barang	13.082.176.000	13.318.702.000
Belanja Bantuan Sosial		0
Belanja Modal	486.500.000	511.500.000
Jumlah Belanja	56.947.073.000	56.607.073.000

Dalam Kegiatan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sampai 31 Desember 2023 telah melakukan Revisi Anggaran, seperti :

- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2023 Revisi ke-1, tanggal 16 Februari 2023, tentang Revisi dalam rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA).
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2023 Revisi ke-2, tanggal 18 April 2023, tentang Revisi dalam rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA).
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-3, tanggal 29 Mei 2023, Revisi dilaksanakan dalam rangka penambahan pagu yang bersumber dari PNB (sebesar Rp25.000.000,00) pada anggaran belanja modal (RAL) secara kolektif (unit eselon)

- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-4, tanggal 15 Juni 2023, Revisi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka :
 - Mengakomodir anggaran pelaksanaan kegiatan Upgrade dan RCC Asesor untuk 22 orang asesor;
 - Mengakomodir rencana pelaksanaan Relisensi LSP P1 BPPP Bitung;
 - Penambahan pagu pemeliharaan AC diambil dari pagu langganan listrik
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-5, tanggal 14 Juli 2023, tentang Revisi dalam rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA).
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-6, tanggal 10 Agustus 2023, tentang Revisi Pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan yaitu penyesuaian gai minus pada bulan Agustus 2023
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-7, tanggal 18 September 2023, tentang Penambahan pagu anggaran pada pemeliharaan halaman kantor
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-8, tanggal 10 Oktober 2023, tentang Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) di Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-9, tanggal 17 Oktober 2023, tentang Pergeseran belanja pegawai untuk pemenuhan kebutuhan belanja operasional
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-10, tanggal 30 Oktober 2023, tentang Pengurangan pagu pada kegiatan percontohan penyuluhan, semula Rp500.000.000,00 menjadi Rp365.000.000,00
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-11, tanggal 17 Nopember 2023, Revisi Kewenangan KPA
- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-12, tanggal

1 Desember 2023, Revisi Kewenangan KPA

- Revisi SP DIPA-032.12.2.239260/2021 Revisi ke-13, tanggal 12 Desember 2023, tentang Pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (KPA)

B.1 Pendapatan

*Realisasi Pendapatan
Rp418.164.997,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp418.164.997,00 atau mencapai 222.59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp187.865.000,00. Pendapatan Satuan kerja Wilayah lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya, Pendapatan sewa Tanah Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI, Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Kode	Uraian	Realisasi Pendapatan		
		Pendapatan	Realisasi	% Real Pendapatan
42	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak			
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan			-
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.545.000	38.500.000	2491.91
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin		-	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	20.000.000	17.447.661	87.24
425151	Pendapatan Penggunaan SaranadanPrasarana sesuai dengan TUSI	134.360.000	99.830.000	74.3
	Jumlah Penerimaan	155.905.000	155.777.661	99.92
4254	Pendapatan Pendidikan, budaya, Riset dan Teknologi		-	
425411	Pendapatan Ujian/ Seleksi Masuk P	-	-	0.00.00
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	0	0
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan	31.960.000	156.790.000	490.58
	Jumlah Pendapatan	31.960.000	156.790.000	0
4258	Pendapatan Denda			
	Pendapatan Denda Penyelesaian			
425811	Pekerjaan Pemerintah		0	
	Jumlah Pendapatan		0	
4259	Pendapatan lain- Lain			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		18.090.400	
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		87.506.936	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		0	
	Jumlah Pendapatan		105.597.336	222.59
	Jumlah Keseluruhan Pendapatan	187.865.000	418.164.997	222.59

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 pada Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yaitu :

- **Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya;** Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa penjualan udang vaname senilai Rp38.500.000,00
- **Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan** merupakan sewa rumah dinas yang ditempati oleh pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung senilai Rp17.447.661,00

Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai dengan TUSI,

- Sewa ruang pertemuan pada kegiatan pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Bitung senilai Rp250.000,00,
- Sewa Asrama kegiatan program Youth PPA ID 0108 El Shaddai Bitung tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2023 senilai Rp1.200.000,00
- Sewa Asrama kegiatan program Youth PPA ID 0108 El Shaddai Bitung tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2023 senilai Rp2.200.000,00
- Sewa Ruang Pertemuan kegiatan program Youth PPA ID 0108 El Shaddai Bitung tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2023 senilai Rp500.000,00
- Sewa Ruang Pertemuan kegiatan program Youth PPA ID 0108 El Shaddai Bitung tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2023 senilai Rp500.000,00
- Kegiatan Assesment Center bagi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Bitung tanggal 17 April 2023 senilai Rp350.000,00
- Sewa ruang pertemuan Seminar Dogmatika Komisi Pelayanan Pemuda Imanuel Aertembaga tahun 2023 tanggal 20 Mei 2023 senilai Rp500.000,00
- Sewa Asrama kegiatan pelatihan Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Bitung senilai Rp16.000.000,00
- Sewa Ruang Kelas kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemkot Bitung senilai Rp2.000.000,00

- Sewa Asrama Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemkot Bitung senilai Rp6.000.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan pelatihan kepemimpinan Adinistrator di lingkungan pemerintah kota Bitung senilai Rp750.000,00
- Sewa ruang pertemuan keg praktek prodi BDP Dosen dan mahasiswa FPIK Unsrat tanggal 13 Juni 2023 senilai Rp.250.00000
- Sewa asrama calon Taruna Poltek KP Bitung senilai Rp2.560.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan PPA ID 0108 El Shadai Bitung tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp500.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan Komunitas Dansa Sulawesi Utara tanggal 16 Juli 2023 senilai 350.000,00
- Sewa asrama calon taruna Poltek KP Bitung senilai Rp640.000,00
- Sewa asrama kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan pemkot Bitung tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2023 senilai Rp6.000.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan pemkot Bitung tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2023 senilai Rp750.000,00
- Sewa asrama orang tua wisudawan/ti taruna/I Poltek KP Bitung tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2023 senilai Rp1.840.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan Sosialisasi terkait dengan Kolaborasi antara e fishery dengan BPPP Bitung tanggal 12 September 2023 senilai Rp350.000,00
- Sewa ruang pertemuan/ aula kegiatan Komunitas Dansa Sulawesi Utara tanggal 6 September 2023 senilai Rp500.000,00

- Sewa asrama kegiatan Pelatihan Teknis Pertolongan Pertama (First aid) bagi Potensi SAR Tahun 2023 Tgl. 13 sd 18 November 2023 (50 org peserta + 18 prg panitia x 5 hari x Rp. 80.000,- = Rp. 27.200.000,-)
- Sewa ruang pertemuan kegiatan Pelatihan Teknis Pertolongan Pertama (First Aid) bagi Potensi SAR Tahun 2023 Tgl, 13 sd 18 November 2023 (6 hr x Rp. 500.000 = Rp. 3.000.000)

Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan,

- Uji Kompetensi Penyuluh Perikanan Bantu, Diklat BST, Upgrading SKK 60 mil ke Ankapin III senilai Rp134.350.000,0
- Biaya Pelatihan Pengolahan Ikan Politeknik Negeri Nusa Utara senilai Rp. 22.440.000.,

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

- Pengembalian Tunjangan Struktural bulan Oktober 2020 s.d. Januari 2023 utk 1 pegawai an. Lucky L. Sambuaga (potongan langsung KPPN) senilai Rp14.580.000,00
- Kelebihan bayar Tunjangan kinerja bulan Februari, Maret 2022 dan Tunjangan kinerja THR Tahun 2022 an. Adi Satria Ramadhan dan Maufuri Tiara senilai Rp3.510.400,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

- Pengembalian kelebihan bayar pekerjaan pemeliharaan gedung workshop permesinan/ bangunan bengkel oleh CV. Farsyah Cipta Bersama senilai Rp1.121.035,00
- Pengembalian belanja pekerjaan pemeliharaan asrama

oleh CV. Cahaya Nusantara senilai Rp9.120.000,00

- Pengembalian kelebihan bayar pekerjaan pemeliharaan gedung kantor permanen workshop permesinan workshop penangkapan senilai Rp2.500.685,00
- Pengembalian kelebihan bayar pekerjaan pemeliharaan gedung pendidikan permanen oleh CV. Carin Jaya senilai Rp1.340.931,00
- Pengembalian belanja pekerjaan pemeliharaan gedung workshop PHP oleh CV. Putra Mandiri senilai Rp4.384.806,00
- Pengembalian perjalanan dinas TAYL senilai Rp69.039.279,00.

B.2 Belanja

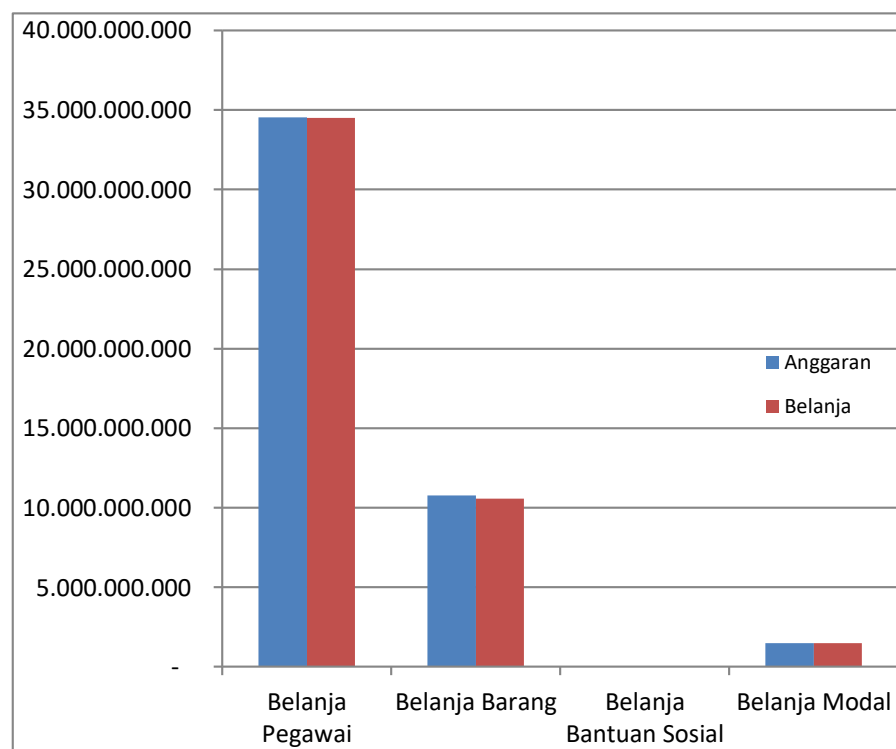
*Realisasi Belanja
Negara
Rp56.403.136.625,00*

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp56.403.136.625,00 atau 68,00% dari anggaran belanja senilai Rp56.607.073.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	42.776.871.000	42.748.266.127
Belanja Barang	13.318.702.000	13.143.444.515
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	511.500.000	511.425.983
Jumlah	56.607.073.000	56.403.136.625

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami Kenaikan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Kenaikan pada belanja Pegawai pada Tahun 2023
2. Adanya penambahan anggaran

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	42.748.266.127	40.556.344.605	-
Belanja Barang	13.143.444.515	10.451.538.748	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	511.425.983	68.742.300	-
Jumlah	56.403.136.625	51.076.625.653	

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp42.748.266.127,00

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp42.748.266.127,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan.

Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	13.340.712.580	12.935.232.320	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	200.184	193.612	-
Bel. Tunj. Suami/ istri PNS	873.927.150	851.410.630	-
Bel. Tunj. Anak	261.634.662	257.726.013	-
Bel. Tunj. Struktural PNS	25.740.000	33.840.000	-
Bel. Tunj. Fungsional PNS	2.596.762.000	2.460.212.000	-
Bel Tunj. PPh PNS	71.101.202	63.491.917	
Bel. Tunj. Beras PNS	749.112.480	743.536.140	
Bel. Uang Makan PNS	2.359.149.000	2.406.072.000	
Bel. Tunj. Umum PNS	59.825.000	69.975.000	
Bel. Pegawai (Tunj. Profesi Dosen)			
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.153.968.500	1.002.677.000	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28.585	23.405	
Bel. Tunj. Suami/ istri PPPK	70.899.350	61.703.200	
Bel. Tunj. Anak PPPK	16.256.420	13.942.550	
Bel. Tunj. Fungsional PPPK	210.060.000	182.520.000	
Bel. Tunj. Beras PPPK	65.322.840	56.560.020	
Bel. Uang Makan PPPK	228.697.000	214.563.000	
Belanja Uang Lembur			
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan)	19.000.242.849	17.770.320.816	
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan/Kinerja PPPK)	1.667.946.170	1.433.277.399	
Jumlah	42.751.585.972	40.557.277.022	
Pengembalian Belanja	3.319.845	932.417	
Jumlah	42.748.266.127	40.556.344.605	

Dalam Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 terdapat Pengembalian Belanja pada satuan kerja Balai Pelatihan dan penyuluhan Perikanan Bitung senilai Rp3.319.845,00. yaitu:

- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS senilai Rp427.600,00
- Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS senilai Rp1.247,00.

- Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS senilai Rp540.000,00.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS senilai Rp42.760,00
- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS senilai Rp370.000,00
- Pengembalian Belanja Uang Makan PNS senilai Rp1.467.000,00
- Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) senilai Rp471.238,00.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp13.143.444.515,00

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp13.143.444.515,00. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan perkantoran	711.411.772	688.388.336	-
Belanja penambah Daya Tahan Tubuh		29.569.200	-
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23.846.500	11.301.460	
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	183.336.000	159.776.000	
Belanja Barang Operasional Lainnya	390.520.693	182.117.207	
Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19 (521131)	36.712.970		-
Belanja Bahan	1.220.755.056	703.637.140	-
Belanja Honor Output Kegiatan	3.570.800.000	3.951.800.000	
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.020.717.974	1.668.065.249	
Belanja Barang Non Operasional- Penangan Pandemi Covid 19		29.340.150	
Belanja Barang Persewaan Barang konsumsi	33.071.500	29.969.500	
Belanja Langganan Listrik	178.995.768	147.672.168	
Belanja Langganan Telepon	15.220.874	15.141.803	
Belanja Langganan Daya dan Jasa lainnya	89.948.963	88.216.856	
Belanja Sewa	85.322.500	41.828.000	
Belanja Jasa Profesi	77.200.000	31.500.000	
Belanja Jasa Lainnya	73.444.500	15.320.000	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.312.554.663	491.959.390	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	337.739.952	280.993.025	
Belanja Pemeliharaan Jaringan	292.655.313	193.099.526	
Belanja Perjalanan Biasa	1.769.902.417	1.072.900.865	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	714.952.000	561.200.000	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.450.000	60.031.105	
Belanja Modal Peralatan dan mesin	0	0	
Belanja Barang Persewaan Pemeliharaan Peralatan	0	0	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	
Jumlah	13.143.559.415	10.453.846.980	
Pengembalian Belanja	114.900	-2308232	
Jumlah Netto	13.143.444.515	10.451.538.748	

Terdapat Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya senilai Rp114.900,00 yaitu:

- Pengembalian Kelebihan Bayar atas Workshop Permesinan senilai Rp114.900.00.

Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung telah merealisasikan belanja dalam rangka penanganan pandemic COVID 19 pada triwulan I Tahun 2023 senilai Rp36.712.970, 00

Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut tersaji dalam tabel berikut :

Tabel. Belanja Barang Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Kode Akun	Uraian Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID 19			
	Pengadaan Masker	1.800.000	1.676.100	
	Paket Data dan Komunikasi	8.700.000	8.700.000	
	Langganan Video Conference	26.400.000	26.336.870	
	Jumlah	36.900.000	36.712.970	99.49

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal
Rp511.425.983,00

Dalam Tahun 2023 Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2023 terdapat Belanja Belanja Modal yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp511.425.983,00 .

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.0 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	Naik (Turun) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan
Mesin
Rp511.425.983,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember dan 2023 sebesar Rp511.425.983,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp511.425.983,00, terdiri atas :

- Pompa Air senilai Rp14.097.000,000
- Pengadaan Peralatan Pendukung Pelatihan (lemari kayu) senilai Rp71.117.613,00
- Meja Kerja Besi/ Metal senilai Rp27.836.000,00
- Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) senilai Rp15.660.000,00
- Pengadaan TV LED 65 inc senilai Rp52.392.000,00
- Mic Conference Rp8.748.000,00
- Bracket Standing 65 inc senilai Rp16.996.320,00
- Camera Digital senilai Rp35.498.000,00
- Video Conference senilai Rp37.786.000,00
- Stabilizer senilai Rp11.460.000,00
- Kipas Penggerak Air senilai Rp43.080.000,00
- Pengadaan laptop Core i5 senilai Rp99.073.050,00
- Printer senilai Rp36.390.000,00
- AC senilai Rp41.292.000,00.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,00*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0,00*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp0.00.

*Belanja Modal
Lainnya Rp.0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp0.00

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 masing-

masing senilai Rp0.

Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 Saldo Kas ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di bendahara pengeluaran	-	-
Kas di bendahara pengeluaran TUP	-	-
Jumlah	-	-

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	-	-
		-
		-
Jumlah	-	-

C.4. Piutang PNBP

Piutang PNBP
Rp13.003.610,00

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp13.003.610,00 dan Rp69.039.279,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Piutang Bukan Pajak	13.003.610	69.039.279
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	13.003.610	69.039.279

Piutang Bukan Pajak senilai Rp13.003.610,00, terdiri atas:

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp13.003.610,00 yaitu pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan Dinas LS.

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian

Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Nama	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		0	0
Jumlah		-	-

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 masing-masing adalah senilai Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lainnya
(Rp65.018,00)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada Satuan Kerja Balai Pelatihan dan penyuluhan Perikanan Bitung senilai (Rp65.018,00).

C.8. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 masing-masing adalah senilai Rp.0 dan Rp.0 Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00*

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 masing-masing adalah senilai Rp.0,00.

C.10. Persediaan

Persediaan
Rp104.960,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah senilai Rp104.960,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	104.960	1.971.650
Bahan Baku	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	104.960	1.971.650

Nilai Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp104.960,00, sebagai berikut :

- Kertas HVS senilai Rp65.000,00
- Amplop senilai Rp139.960,00

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
TP/TGR
Rp0.00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan

Angsuran
Rp0.00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.0 Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0.00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

30 September 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14. Tanah

Tanah
Rp47.242.271.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp47.242.271.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	47.242.271.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Jumlah	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2023	47.242.271.000

Rincian Kepemilikan Tanah pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas/ m2	Lokasi	Nilai
1	70.000	Jl. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua	24.421.147.000
2	14.390	Jl. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua	6.444.986.000
3	25.400	Jl. Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua	11.376.138.000
4			-
Jumlah			42.242.271.000

Ketiga Tanah ini telah dikeluarkan Penetapan Status Penggunaan BMN pada kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nomor :133/KM.6/WKN.16/2017 tanggal 28 November 2017.

C.15. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp21.133.865.816,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah Rp21.133.865.816,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	20.622.439.833
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	0
Pembelian	511.425.983
Koreksi tambah	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Jumlah	21.133.865.816
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0
Saldo per 31 Desember 2023	21.133.865.816
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	19.859.608.478
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.274.257.338

Dalam Peralatan dan Mesin terdapat pembelian senilai Rp511.425.983,00, terdiri atas :

- Pompa Air senilai Rp14.097.000,000
- Pengadaan Peralatan Pendukung Pelatihan (lemari kayu) senilai Rp71.117.613,00

- Meja Kerja senilai Rp24.950.000,00
- Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) senilai Rp15.660.000,00
- Pengadaan TV LED 65 inc senilai Rp52.392.000,00
- *Mic Conference* Rp8.748.000,00
- Bracket Standing 65 inc senilai Rp16.996.320,00
- Camera Digital senilai Rp35.498.000,00
- Video Conference senilai Rp37.786.000,00
- Stabilizer senilai Rp11.460.000,00
- Kipas Penggerak Air senilai Rp43.080.000,00
- Pengadaan laptop Core i5 senilai Rp99.073.050,00
- Printer senilai Rp36.390.000,00
- AC senilai Rp41.292.000,00

Pada Peralatan dan mesin Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yang sudah dilakukan Penetapan Status senilai Rp20.622.439.833,00, dan belum PSP senilai Rp95.225.000,00.

C.16. Gedung dan Bangunan

Realisasi Gedung dan Bangunan
Rp19.887.744.362,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah Rp19.887.744.362,00.

Tidak ada transaksi, baik mutasi tambah maupun kurang.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada laporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	19.887.744.362
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Perolehan/ Penambahan KDP	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/ Kuantitas	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	19.887.744.362
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(3.626.785.765)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	16.260.958.597

Pada Gedung dan Bangunan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yang sudah dilakukan Penetapan Status senilai Rp19.887.744.362,00.

C.17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi*

Rp24.548.036.500,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp24.548.036.500,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	24.548.036.500
Mutasi tambah:	
Koreksi Kesalahan input IP (Jalan dan Jembatan)	0
Koreksi Kesalahan input IP (Irigasi)	0
Saldo Awal (Irigasi)	0
Jumlah	24.548.036.500
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	24.548.036.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-20.808.672.070
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3.739.364.430

Pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan senilai Rp2.881.486.500,00.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp63.652.000,00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Rp63.652.000,00.

Aset ini meliputi :

- Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung senilai Rp63.652.000,00, yaitu:
 - Buku Rp.54.652.000,00
 - Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen Rp.9.000.000,00

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp32.687.016,00*

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 senilai Rp32.687.016,00, sebagai berikut :

1. Perjalanan dalam rangka Koordinasi/ Konsultasi/ Survei senilai Rp13.087.016,00.
2. Jasa Konsultan Perencana Master Plan kantor BPPP Bitung senilai Rp19.600.000,00.

Sudah diusulkan penghapusan sesuai surat permohonan persetujuan penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dari Kepala Biro Keuangan KKP No.220/SJ/PL.750/IX/2023 tanggal 04 September 2023

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp44.295.066.313, 00)*

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah (Rp44.295.066.313,00) dan (Rp41.050.400.740,00).

Akumulasi Penyusutan ini meliputi :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp19.859.608.478,00
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp3.626.785.765,00
3. Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Rp20413.564.391,00
4. Akumulasi Penyusutan Irigasi Rp273.855.416,00
5. Akumulasi Penyusutan Jaringan Rp121.252.263,00.

*Aset Tak Berwujud
Rp0,00*

C.21. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0,00*

C.22. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp425.885.000,00. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	425.855.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghentian aset dari penggunaan	(425.855.000)
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp0,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah (Rp0,00) dan (Rp443.385.000,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.24. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp25.797.270,00.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp25.797.270,00 dan Rp16.585.923,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Listrik	20.405.039	Listrik Desember 2023 dibayarkan bulan Januari 2024
Telepon	1.193.371	Telepon Desember 2023 dibayarkan bulan Januari 2024
Langganan Internet	4.198.860	Langganan Internet Desember 2023 dibayarkan bulan Januari 2024
Jumlah	25.797.270	

Utang yang belum ditagihkan Rp0,00

C.26. Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan pada Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0.00.

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0,00

C.27. Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNB, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan Diterima di Muka Rp.0

C.28. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp0.00 dan Rp0.00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp25.797.270,00

C.29. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 senilai Rp25.797.270,00, Beban ini merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Listrik	20.405.039	Listrik Desember 2023 dibayarkan bulan Januari 2024
Telepon	1.193.371	Telepon Desember 2023 dibayarkan bulan Januari 2024
Langganan Internet	4.198.860	Langganan Internet Desember 2023 dibayarkan bulan Januari 2024
Jumlah	25.797.270	

C.30. Ekuitas

Ekuitas

Rp68.600.436.663,00

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp68.600.436.663,00 dan Rp71.400.509.781,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp312.567.661,00*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp312.567.661,00 dan Rp175.193.222,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	38.500.000	34.710.000
Pend sewa Tanah, gedung bangunan	17.447.661	18.933.222
PendapatanPengunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	99.830.000	121.550.000
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-
Pendapatan Biaya Pendidikan	-	-
Pedapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	156.790.000	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-
Jumlah	312.567.661	175.193.222

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 senilai Rp312.567.661,00 pada Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung yaitu :

- **Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya;** Hasil Sampling Kegiatan budidaya berupa penjualan udang vaname senilai Rp38.500.000,00
- **Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan** merupakan sewa rumah dinas yang ditempati oleh pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung senilai Rp17.447.661,00

Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai dengan TUSI,

- Sewa ruang pertemuan pada kegiatan pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Bitung senilai Rp250.000,00,
- Sewa Asrama kegiatan program Youth PPA ID 0108 El Shaddai Bitung tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2023 senilai Rp1.200.000,00
- Sewa Asrama kegiatan program Youth PPA ID 0108 El Shaddai Bitung tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2023 senilai Rp2.200.000,00
- Sewa Ruang Pertemuan kegiatan program Youth PPA ID 0108 El Shaddai Bitung tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2023 senilai Rp500.000,00
- Sewa Ruang Pertemuan kegiatan program Youth PPA ID 0108 El Shaddai Bitung tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2023 senilai Rp500.000,00
- Kegiatan Assesment Center bagi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Bitung tanggal 17 April 2023 senilai Rp350.000,00
- Sewa ruang pertemuan Seminar Dogmatika Komisi Pelayanan Pemuda Imanuel Aertembaga tahun 2023 tanggal 20 Mei 2023 senilai Rp500.000,00
- Sewa Asrama kegiatan pelatihan Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Bitung senilai Rp16.000.000,00
- Sewa Ruang Kelas kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan

Pemkot Bitung senilai Rp2.000.000,00

- Sewa Asrama Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemkot Bitung senilai Rp6.000.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan pelatihan kepemimpinan Adinistrator di lingkungan pemerintah kota Bitung senilai Rp750.000,00
- sewa ruang pertemuan keg praktek prodi BDP Dosen dan mahasiswa FPIK Unsrat tanggal 13 Juni 2023 senilai Rp.250.00000
- Sewa asrama calon Taruna Poltek KP Bitung senilai Rp2.560.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan PPA ID 0108 El Shadai Bitung tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp500.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan Komunitas Dansa Sulawesi Utara tanggal 16 Juli 2023 senilai 350.000,00
- Sewa asrama calon taruna Poltek KP Bitung senilai Rp640.000,00
- Sewa asrama kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan pemkot Bitung tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2023 senilai Rp6.000.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan pemkot Bitung tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2023 senilai Rp750.000,00
- Sewa asrama orang tua wisudawan/ti taruna/I Poltek KP Bitung tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2023 senilai Rp1.840.000,00
- Sewa ruang pertemuan kegiatan Sosialisasi terkait dengan Kolaborasi antara e fishery dengan BPPP Bitung tanggal 12 September 2023 senilai

Rp350.000,00

- Sewa ruang pertemuan/ aula kegiatan Komunitas Dansa Sulawesi Utara tanggal 6 September 2023 senilai Rp500.000,00
- Sewa asrama kegiatan Pelatihan Teknis Pertolongan Pertama (First aid) bagi Potensi SAR Tahun 2023 Tgl. 13 sd 18 November 2023 (50 org peserta + 18 prg panitia x 5 hari x Rp. 80.000,- = Rp. 27.200.000,-)
- Sewa ruang pertemuan kegiatan Pelatihan Teknis Pertolongan Pertama (First Aid) bagi Potensi SAR Tahun 2023 Tgl, 13 sd 18 November 2023 (6 hr x Rp. 500.000 = Rp. 3.000.000)

Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan,

- Uji Kompetensi Penyuluh Perikanan Bantu, Diklat BST, Upgrading SKK 60 mil ke Ankapin III senilai Rp134.350.000,00
- Biaya Pelatihan Pengolahan Ikan Politeknik Negeri Nusa Utara senilai Rp22.440.000,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 senilai Rp42.747.266.127,00 Rp42.748.266.127,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Gaji	13.340.712.580	12.935.232.320
Beban Pembulatan Gaji PNS	200.184	193.612
Beban Tunj. Suami/istri PNS	873.927.150	851.410.630
Beban Tunj. Anak PNS	261.634.662	257.726.013
Beban Tunj. Struktural PNS	25.740.000	33.840.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.596.762.000	2.460.212.000
Beban Tunj. PPh PNS	71.101.202	63.491.917
Beban Tunj. Beras PNS	749.112.480	743.536.140
Beban Uang Makan PNS	2.359.149.000	2.406.072.000
Beban Tunj. Umum PNS	59.825.000	69.975.000
Beban Pegawai		
Beban Gaji Pokok PPPK	1.153.968.500	1.002.677.000
Beban Pembulatan Gaji PPPK	28.585	23.405
Beban Tunj. Suami/istri PPPK	70.899.350	61.703.200
Beban Tunj. Anak PPPK	16.256.420	13.942.550
Beban Tunj. Fungsional PPPK	210.060.000	182.520.000
Beban Tunj. Beras PPPK	65.322.840	56.560.020
Beban Uang Makan PPPK	228.697.000	214.563.000
Beban Uang Lembur		
Beban Tunjangan Profesi Dosen		
Beban Pegawai (Tunj Khusus/ kegiatan)	19.000.242.849	17.770.320.816
Beban Pegawai (Tunj Khusus/ kegiatan/kinerja PPPK)	1.667.946.170	1.433.277.399
Jumlah	42.751.585.972	40.557.277.022
Pengembalian Belanja	(3.319.845)	-932417
Jumlah	42.748.266.127	40.556.344.605

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan Rp.
34.938.130,00

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp34.938.130,00 dan Rp28.954.225,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	34.938.130	28.954.225	-
Beb Persediaan Bahan utk pemeliharaan			-
Beban Persediaan Suku Cadang			-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	
Beban Persediaan Lainnya	-	-	
Jumlah	34.938.130	28.954.225	-

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp8.687.330.017,
00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp8.687.330.017,00 dan Rp7.763.899.843,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Keperluan Perkantoran	711.411.772	688.388.336
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		29.569.200
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23.846.500	11.301.460
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	183.336.000	159.776.000
Beban Barang Operasional Lainnya	390.520.693	182.117.207
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID 19 (521131)	36.712.970	
Beban Bahan	1.220.755.056	703.637.140
Beban Honor Output Kegiatan	3.570.800.000	3.951.800.000
Beban Barang Non Operasional lainnya	2.020.717.974	1.668.065.249
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID 19 (521241)		29.340.150
Beban Langganan Listrik	187.632.168	147.676.668
Beban Langganan Telepon	15.040.741	15.332.597
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	90.704.043	88.247.836
Beban Jasa Pos dan Giro		0
Beban Sewa	85.322.500	41.828.000
Beban Jasa Profesi	77.200.000	31.500.000
Beban Jasa Lainnya	73.444.500	15.320.000
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan mesin	-	-
Jumlah	8.687.444.917	7.763.899.843
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-114900	
Jumlah	8.687.330.017	7.763.899.843

Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya senilai Rp114.900,00 yaitu:

- Pengembalian Kelebihan Bayar atas Workshop Permesinan senilai Rp114.900.00.

Beban Pemeliharaan
Rp1.942.949.928,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp1.942.949.928,00 dan Rp966.051.941,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.312.554.663	491.959.390	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	337.739.952	280.993.025	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	292.655.313	193.099.526	-
Beban Persediaan bahan utk pemeliharaan	0	0	-
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	-
Jumlah	1.942.949.928	966.051.941	

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp2.476.300.807,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp2.476.300.807,00 dan Rp1.622.784.459,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.756.898.807	1.003.861.586	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	714.952.000	561.200.000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.450.000	60.031.105	-
Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri	0	0	-
Jumlah	2.476.300.807	1.625.092.691	-
Pengembalian Bel. Perjadin Biasa	0	2.308.232	
Jumlah	2.476.300.807	1.622.784.459	

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.941.949.188,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp1.941.949.188,00 dan Rp2.074.531.244,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	319.232.066	451.814.122	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	227.599.690	227.599.690	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	1.395.117.432	1.395.117.432	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset Tetap yang tdk digunakan di	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.941.949.188	2.074.531.244	

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
(Rp280.178,00)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 senilai

(Rp280.178,00) dan Rp345.196.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	280.178	345.196	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	-
Jumlah	-280.178	345.196	-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	104.664.810	
Pendapatan dari keg. Non operasional lainnya	36.558.057	185.569	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	36.558.057	104.850.379	-

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp36.558.057,00*

*Pos Luar Biasa
Rp.0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp71.400.509.781,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp71.400.509.781,00 dan Rp75.870.855.700,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp58.785.044.746,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai (Rp58.785.044.746,00) dan (Rp54.699.064.294,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang menambah/ Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar.

Koreksi- koreksi ini berdasarkan pada :

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp0 dan Rp0.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi
(Rp0,00)

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 (Rp0,00 dan Rp0,00,).

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
(Rp0,00)

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai (Rp0,00) dan (Rp692.640.217,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap Non Revaluasi senilai Rp0,00)dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai senilai Rp0,00

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp55.984.971.628,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp55.984.971.628,00 dan Rp50.921.358.592,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar

BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Diterima dari Entitas Lain	(335.236.353)	-159.790.357
Ditagikan ke Entitas Lain	38.539.273.782	36.035.628.394
Transfer Masuk	-	-
Transfer Keluar	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	38.204.037.429	35.875.838.037

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023 dan 2022, DDEL senilai (Rp418.164.997,00) sedangkan DKEL senilai Rp56.403.136.625,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1			-
3			-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp. 0,00 dan Rp0,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp69.903.153.108,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp68.600.436.663,00 dan Rp71.400.509.781,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Untuk Aset dan Persediaan telah dilaporkan melalui aplikasi SAKTI juga aplikasi SIMAN.
- Untuk Modul Pelaporan telah dilaporkan melalui Aplikasi SAKTI
- Satker BPPP Bitung melakukan Rekonsiliasi Data dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung melalui Om Span dan Aplikasi SAKTI
- Satker BPPP Bitung ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah UAKPPA-W

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Kegiatan pelatihan dilakukan oleh satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung per 31 Desember 2023 dilakukan dalam sistem Luring dan Daring.
- Temuan BPK terkait Geotagging tahun 2021 sudah ditindak lanjuti.